

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANGKA

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POPULATIONS, PDRB AND REGIONAL EXPENDITURE ON REGIONAL TAX REVENUE IN BANGKA REGENCY

Divina Aufa Widiana ^{1a}, Chiky Adiesty ^{2a}, Arif Rahman ^{3a}, Anggi Septa Heruliyansyah ^{4a}

^a Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bangka Belitung; Kampus Terpadu UBB, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung 33172; divinaaufaa@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 10/08/2025
- Artikel diterima: 10/11/2025
- Tersedia Online: 30/12/2025

ABSTRAK (dalam Bahasa Indonesia)

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui proses yang berkelanjutan, dengan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka, dengan fokus pada jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja daerah. Berdasarkan data time series selama 10 tahun (2014-2023), analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk (X_1) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka, dengan kontribusi sebesar 77%. Hal ini berarti bahwa variasi penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan sebagian besar oleh jumlah penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka.

Kata Kunci : Belanja Daerah; Jumlah Penduduk; Pajak Daerah; PDRB

ABSTRACT

National development aims to improve the welfare of the people through a sustainable process, with one important aspect that needs to be considered being development financing. Regional autonomy grants local governments the authority to manage governance affairs, including financing sources from Local Revenue (PAD), which includes local taxes, levies, and the management of regional assets. This study aims to analyze the factors affecting local tax revenue in Bangka Regency, with a focus on population size, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and regional spending. Based on a 10-year time series data (2014-2023), multiple regression analysis was used to examine the relationship between these variables and local tax revenue. The results show that population size (X_1) has a positive and significant correlation with local tax revenue in Bangka Regency, with a contribution of 77%. This means that the variation in local tax revenue can largely be explained by population size. Thus, population size is the main factor influencing local tax revenue in Bangka Regency.

Keyword: Regional Spending; Population Size; Local Tax; GRDP

Cara men-sitasi (APA 6th Style):

Widiana, D. A., et. al. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bangka. *Zoning: Journal of Urban and Regional Planning*, 2(2), 59-69.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan pelaksanaannya berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengembangkan dan mewujudkan perubahan ke arah dan kondisi yang lebih baik (Setiani, Domai, & Wachid, 2014). Pembangunan di suatu daerah salah satunya harus memperhatikan aspek pembiayaan pembangunan.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam (Thahir, 2019). Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan ekefektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang variatif, dan kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dampaknya nanti akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah (Maznawaty, Ilat, & Elim, 2015).

Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai Daerah Otonom pada peraturan yang telah disesuaikan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Wewenang ini diberikan agar Kabupaten Bangka dapat mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya secara mandiri. Tingkat kemandirian juga dapat dilihat berdasarkan kapasitas finansialnya, sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Finansial ini dapat meliputi pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayain pelaksanaan kewenangan yang telah dibebankan pada suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah atau digunakan sebagai sumber biaya dalam pembangunan infrastruktur adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sederhananya, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada daerah (Asteria, 2015). Pajak daerah menjadi komponen yang penting dalam aspek pembiayaan, karena dapat mendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah otonomi terkait dengan aspek pembiayaan adalah ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU dan DAK), potensi pajak yang terbatas karena ekonomi lemah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cerly M. Mongdong, Vecky A.J Masinambow dan Steeva Tumangkeng pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon, menganalisis bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Infrastruktur dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan data sekunder dan kemudian data diolah menggunakan metode analisis regresi liner berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa PDRB dan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan

Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Rendra Fahmi dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998 – 2013, penulis mengkaji pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang selama periode 1998-2013. Penulis menggunakan metode regresi liner, dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB dan belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

Adapun dalam penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2018 yang dilakukan oleh Anggi Priandita Putra, Fadjar Harimurti, dan Sunarti, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2018, dengan variabel-variabel yang meliputi PDRB, jumlah penduduk, dan belanja pemerintah. Melalui analisis data sekunder dan penggunaan metode regresi, penelitian ini menemukan bahwa PDRB dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah terletak pada lokasi kajian. Lokasi yang dilakukan saat ini berfokus pada skala Kabupaten, sedangkan peneliti pertama berfokus pada skala kota yang memiliki karakteristik administrasi dan ekonomi yang berbeda dengan kabupaten, sedangkan peneliti ketiga berada pada skala provinsi, cengan cakupan wilayah yang lebih luas. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data *time series* 10 tahun terakhir, yang digunakan untuk dapat melihat tren perubahan dalam periode waktu yang lebih spesifik, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data dengan periode yang lebih panjang dan lebih bervariasi. Penelitian pertama menggunakan data tanpa menyebutkankan periode spesifik, sedangkan yang kedua menggunakan data dari tahun 1998 hingga 2013. Penelitian ketiga juga mencakup periode 2014-2018, meskipun lebih terbatas jika dibandingkan dengan data 10 tahun yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pada segi penggunaan data, penelitian ini berfokus pada jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka, dengan fokus pada faktor ekonomi, demografi, dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penelitian pertama menambahkan infrastruktur sebagai variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, sedangkan penelitian kedua dan ketiga lebih menekankan pada pengaruh belanja daerah, meskipun efeknya bervariasi tergantung pada wilayah dan periode yang diteliti. Perbedaan utama terletak pada penekanan infrastruktur di penelitian pertama dan belanja daerah di penelitian kedua dan ketiga.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya kajian mendalam mengenai faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka berdasarkan 3 aspek yang berpotensi dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah, yaitu jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, maka digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah berdasarkan tiga variabel dengan cara menguji hubungan antara penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen dan jumlah penduduk, PDRB, serta belanja daerah sebagai variabel independen. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bangka.”

2. DATA DAN METODE

2.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung, dimana data dapat diperoleh melalui referensi seperti artikel ilmiah dari jurnal, buku, situs internet, maupun data yang diperoleh dari instansi terkait (Sari & Zefri, 2019). Untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka,

maka digunakan 3 variabel yang merupakan *time series* selama 10 tahun terakhir. Adapun variabel yang menjadi data dalam penelitian ini meliputi data jumlah penduduk di Kabupaten Bangka tahun 2014 – 2023, data PDRB

- a. Data Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (X1)
- b. Data Produk Domestik Regional di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (X2)
- c. Data Belanja Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (X3)
- d. Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bangka 2014 – 2023 (Y)

2.2. Metode

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena secara realistis, nyata, serta aktual, yang dilakukan dengan membuat gambaran secara deskriptif terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti (Wulandari, Faturrohman, & Widodo, 2023). Sedangkan metode pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan angka atau nominal, dimana data tersebut sering digunakan untuk penelitian survei, dan penelitiannya seringkali menggunakan pengukuran, rumus, perhitungan, dan kepastian data dalam bentuk numerik (Waruwu, 2023). Dengan kata lain, pendekatan kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh hasil akhir melalui data angka yang bertindak sebagai alat untuk menganalisis data.

Adapun regresi linear berganda merupakan model regresi linear yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau variabel X (Sudariana & Yoedani, 2021). Tujuan dari digunakannya analisis regresi linear berganda adalah untuk dapat memperkirakan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel terikat atau variabel Y jika nilai variabel bebas telah diketahui. Berikut model analisis regresi berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bangka

Penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Daerah. Untuk membiayai daerah, Kabupaten Bangka diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya, termasuk mengurus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan Kabupaten Bangka merupakan daerah yang otonom. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak. Berikut perkembangan pajak daerah di Kabupaten Bangka dari tahun 2014 – 2023.

Table 1. Pajak Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (BPS Kabupaten Bangka Dalam Angka 2015 – 2024)

No.	Tahun	Pajak Daerah	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2014	30.000.000.000,00	30.040.000.000,00
2.	2015	31.570.000.000,00	33.870.000.000,00
3.	2016	43.070.000.000,00	43.860.000.000,00
4.	2017	38.130.000.000,00	72.790.000.000,00
5.	2018	53.720.000.000,00	62.580.000.000,00
6.	2019	55.841.928.250,00	59.371.242.190,48
7.	2020	51.960.117.000,00	60.672.648.246,45
8.	2021	59.149.310.750,00	61.738.507.052,82
9.	2022	67.324.310.750,00	63.695.737.792,48
10.	2023	64.053.500.000,00	71.929.274.137,10

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Bangka, dalam kurun waktu 10 tahun, tahun 2023 memiliki realisasi pajak daerah yang melebihi anggaran pajak daerah, dengan total jumlahrealisasi pajak sebesar Rp71.929.274.137,10 dan anggaran pajaknya sebesar Rp64.053.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan dari pajak daerah pada tahun 2023 berada pada kondisi surplus dan berpotensi dapat digunakan untuk kebutuhan seperti pembangunan, pelayanan publik, atau program prioritas daerah.

Jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah karena pendapatan daerah diperoleh melalui aktivitas yang dilakukan oleh penduduk pada aspek ekonomi. Aktivitas tersebut berupa pemungutan pajak, retribusi, dan lain-lain. Keberadaan penduduk dapat memberikan dapat yang positif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah yang kemudian berdampak pula pada meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penduduk di Kabupaten Bangka terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2018, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019, sebelum kembali naik dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Berikut data perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka dari tahun 2014 – 2023.

Table 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (BPS Kabupaten Bangka Dalam Angka 2015 – 2024)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2014	304.485
2.	2015	311.085
3.	2016	317.735
4.	2017	324.305
5.	2018	330.793
6.	2019	318.756
7.	2020	326.265
8.	2021	329.911
9.	2022	334.344
10.	2023	332.964

Berdasarkan Table 1, penduduk di Kabupaten Bangka paling tinggi berada di tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebanyak 334.344 jiwa. Sedangkan penduduk paling rendah yaitu berada pada angka 304.485 jiwa pada tahun 2014.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator yang juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meningkatnya PDRB dapat memberikan kenaikan pada sektor-sektor yang membentuk PDRB. Sektor pembentuk yang meningkat dapat memberikan kenaikan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan keuangan daerah. Berikut perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka dari tahun 2014 – 2023.

Table 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (BPS Kabupaten Bangka Dalam Angka 2015 – 2024)

No.	Tahun	PDRB ADHB (Rp)
1.	2014	10.174.800.000,00
2.	2015	11.174.800.000,00
3.	2016	11.771.680.000,00
4.	2017	12.317.040.000,00

5.	2018	13.310.570.000,00
6.	2019	13.765.430.000,00
7.	2020	13.932.940.000,00
8.	2021	16.166.010.000,00
9.	2022	17.958.780.000,00
10.	2023	19.298.850.000,00

PDRB di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan secara progresif dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, jumlah PDRB adalah sebanyak Rp10.174.800.000,00. Pada tahun 2023, PDRB mencapai puncaknya, dengan total jumlah yaitu Rp19.298.850.000,00

Kemudian, Belanja Daerah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah karena meningkatnya suatu aktivitas yang dilakukann oleh pelaku ekonomi harus disetarakan dengan fasilitas atau sarana prasarana yang pemerintah sediakan, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan anggaran untuk penyediaan fasilitas pada belanja daerah. Dengan tersedianya fasilitas yang mumpuni, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kemudian akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Berikut perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Bangka dari tahun 2014 – 2023.

Table 4. Belanja Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2023 (BPS Kabupaten Bangka Dalam Angka 2015 – 2024)

No.	Tahun	Belanja Daerah	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2014	889.980.000.000,00	890.180.000.000,00
2.	2015	979.910.000.000,00	1.047.230.000.000,00
3.	2016	1.244.000.000.000,00	1.152.640.000.000,00
4.	2017	1.126.620.000.000,00	1.085.990.000.000,00
5.	2018	1.018.210.000.000,00	1.072.740.000.000,00
6.	2019	1.214.300.000.000,00	1.242.580.000.000,00
7.	2020	1.001.030.000.000,00	1.152.650.000.000,00
8.	2021	1.281.100.000.000,00	1.172.450.000.000,00
9.	2022	1.270.240.000.000,00	1.299.820.000.000,00
10.	2023	1.474.560.000.000,00	1.352.460.000.000,00

Berdasarkan Table 3, pada tahun 2014 hingga 2017, Belanja Daerah mengalami peningkatan belannja yang stabil. Setelah tahun 2017, kondisi belanja daerah mengalami fluktuasi hingga 2023. Belanja daerah palinig tinggi berada pada tahun 2023, mencapai Rp1.352.460.000.000,00.

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui variabel yang berperan atau berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, maka digunakan analisis regresi berganda.

3.2.1 Descriptive Statistics

Descriptive statistics menunjukkan 4 variabel yang akan dianalisis, dimana Pajak Daerah (Y₁) menjadi variabel terikat, dan Jumlah Penduduk (X₁), PDRB (X₂), serta Belanja Daerah (X₃) menjadi variabel bebas.

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PAJAKDAERAH1	5.61E+12	1.496E+12	10
JMLPENDUDUK1	323064.30	9884.255	10
PDRBX2	1.40E+12	2.970E+11	10
BELANJADAERAH3	1.15E+14	1.336E+13	10

Gambar 1. Output Descriptive Statistics (Hasil Olah Data, 2024)

Total data disajikan pada kolom N, dimana pada analisis ini digunakan data sebanyak 10 data, yang merupakan data *time series* dari setiap variabel yang dikaji.

3.2.2 Correlations

Correlations menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Kekuatan antar variabel tersebut dapat dilihat pada kolom *Pearson Correlation*.

Correlations					
		PAJAKDAERA HY1	JMLPENDUD UK1	PDRBX2	BELANJADAE RAHX3
Pearson Correlation	PAJAKDAERAH1	1.000	.877	.706	.680
	JMLPENDUDUK1	.877	1.000	.841	.743
	PDRBX2	.706	.841	1.000	.877
	BELANJADAERAH3	.680	.743	.877	1.000
Sig. (1-tailed)	PAJAKDAERAH1	.	.000	.011	.015
	JMLPENDUDUK1	.000	.	.001	.007
	PDRBX2	.011	.001	.	.000
	BELANJADAERAH3	.015	.007	.000	.
N	PAJAKDAERAH1	10	10	10	10
	JMLPENDUDUK1	10	10	10	10
	PDRBX2	10	10	10	10
	BELANJADAERAH3	10	10	10	10

Gambar 2. Output Correlations (Hasil Olah Data, 2024)

Pada *Pearson Correlation*, variabel Jumlah Penduduk (X1) dengan Pajak Daerah (Y1) memiliki korelasi positif kuat sebesar 0,877, menandakan bahwa peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan kenaikan daerah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. PDRB(X2) dengan Pajak Daerah (Y1) memiliki korelasi positif sebesar 0,706, menandakan bahwa kenaikan PDRB meningkatkan produksi ekonomi yang mencerminkan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan kenaikan pajak daerah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan belanja daerah (X3) dengan Pajak daerah (Y1) memiliki korelasi positif sebesar 0,680, menandakan bahwa peningkatan belanja daerah juga meningkatkan penerimaan pajak. Pada bagian Signifikansi, variabel Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2) dan Belanja Daerah (X3) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki korelasi terhadap variabel Pajak Daerah (Y1).

3.2.3 Variables Entered/Removed

Variable Entered merupakan variabel yang digunakan dalam perhitungan analisis, sedangkan *Variable Removed* merupakan variabel yang tidak digunakan dalam perhitungan analisis. Adapun *Variable Enter* merupakan semua variabel yang dimasukkan dalam hubungan perhitungan analisis.

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	JMLPENDUD UKX1		Stepwise (Criteria: Probability-of- F-to-enter <= . 050, Probability-of- F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1

Gambar 3. Output Variables Entered/Removed (Hasil Olah Data, 2024)

Output pada *Variables Entered/Removed* menunjukkan bahwa jumlah penduduk (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah (Y_1) dengan menggunakan metode *stepwise* dan tidak ada variabel yang dihapus karena Jumlah Penduduk (X_1) memenuhi syarat untuk tetap dalam model, berdasarkan kriteria probabilitas F. Variabel masuk ke dalam model apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dan variabel dikeluarkan apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,1.

3.2.4 Model Summary (Uji Determinasi R^2)

Output *Model Summary* digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan antara kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.770	.741	7.613E+11	2.497

a. Predictors: (Constant), JMLPENDUDUKX1
 b. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1

Gambar 4. Output Model Summary (Hasil Olah Data, 2024)

Model Summary menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Jumlah Penduduk (X_1) dengan Pajak Daerah (Y_1). Nilai R sebesar 0,877 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara variabel bebas atau Jumlah Penduduk X_1 dan variabel terikat atau Pajak Daerah Y_1 . Tidak ada variabel yang dihapus karena Jumlah Penduduk X_1 memenuhi syarat untuk tetap dalam model, berdasarkan kriteria probabilitas F. Nilai R Square sebesar 0,770 berarti bahwa sekitar 77% variasi dalam Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh Jumlah Penduduk. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,741 menunjukkan bahwa model ini masih memiliki kekuatan menjelaskan data dengan baik setelah mempertimbangkan kompleksitasnya. Adapun nilai Durbin-Watson sebesar 2,497 digunakan untuk menguji adanya autokorelasi dalam residual. Nilai dekat 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi yang signifikan.

3.2.5 Anova (Uji F)

Uji F digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana variabel bebas secara simultan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pada analisis ini, derajat kepercayaan yang dijadikan sebagai acuan adalah 0,05.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.552E+25	1	1.552E+25	26.767	.001 ^b
	Residual	4.637E+24	8	5.797E+23		
	Total	2.015E+25	9			

a. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1
 b. Predictors: (Constant), JMLPENDUDUKX1

Gambar 5. Output Anova (Hasil Olah Data, 2024)

Output Anova menunjukkan bahwa model regresi yang menggunakan variabel Jumlah Penduduk (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Daerah (Y1). Nilai F sebesar 26.767 dengan signifikansi 0.001 mengartikan bahwa model regresi yang menggunakan Jumlah Penduduk sebagai prediktor secara signifikan lebih baik dalam menjelaskan pajak daerah dibandingkan dengan model yang hanya memperhitungkan rata-rata tanpa prediktor. Artinya, jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi pajak daerah.

3.2.6 Coefficients (Uji t)

Coefficients digunakan untuk menguji hubungan setiap variabel terhadap variabel terikat. Nilai t berfungsi menjadi nilai koefisien setiap variabel independennya. Semakin kecil nilai signifikansi, maka variabel tersebut akan semakin dapat dijadikan sebagai alat prediksi. *Constant* yaitu bilangan tetap atau konstan variabel terikat jika variabel bebas bernilai nol. Terdapat dasar keputusan yang diambil untuk dapat menentukan hasil dari *output*. Jika nilai signifikansi $F < 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan jika nilai signifikansi $F > 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.731E+13	8.298E+12		-4.496	.002		
	JMLPENDUDUKX1	132837968.2	25675476.37	.877	5.174	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1

Gambar 6. Output Coefficients (Hasil Olah Data, 2024)

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Daerah X1. Koefisien regresi untuk Jumlah Penduduk X1 adalah 132.837.968,223, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit jumlah penduduk diperkirakan akan meningkatkan pajak daerah sekitar Rp132.838.000. Nilai t sebesar 5,174 dan signifikansi 0,001 menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Nilai Beta standar 0,877 menandakan korelasi yang kuat, sedangkan toleransi dan VIF masing-masing 1,000 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. Berdasarkan dasar keputusan, hasil analisis regresi variabel Jumlah Penduduk (X1) dan variabel Pajak Daerah (Y1) menunjukkan nilai signifikansi 0,001 yang artinya dasar keputusannya adalah $0,001 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.2.7 Excluded Variables

Excluded Variables menjelaskan bagaimana proses mengeluarkan atau mengeliminasi variabel bebas yang tidak layak untuk dimasukkan pada model regresi. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel X1, X2, dan X3 tidak layak untuk dimasukkan ke dalam model regresi.

Excluded Variables ^a								
Model	Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics			
					Tolerance	VIF	Minimum Tolerance	
1	PDRBX2 BELANJADAERAH3	-.109 ^b .064 ^b	-.327 .236	.753 .820	-.123 .089	.293 .448	3.410 2.231	.293 .448

a. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1
 b. Predictors in the Model: (Constant), JMLPENDUDUKX1

Gambar 7. Output Coefficients (Hasil Olah Data, 2024)

Berdasarkan analisis ini, variabel yang dikeluarkan dari model regresi adalah PDRB (X₂) dan Belanja Daerah (X₃). Nilai t menunjukkan seberapa jauh koefisien beta dari nol. Jika t mendekati nol, variabel cenderung tidak signifikan, terlihat dari p-value tinggi. PDRB (t = -0,327, p = 0,753) dan Belanja Daerah (t = 0,236, p = 0,820) tidak signifikan dalam mempengaruhi Pajak Daerah, sehingga dikeluarkan dari model. Korelasi parsial yang lemah (PDRB: -0,123; Belanja Daerah: 0,089) menunjukkan kontribusi rendah terhadap Pajak Daerah. VIF < 10 menunjukkan tidak ada masalah multikolinieritas yang serius meskipun variabel tidak signifikan. Pada analisis ini, hanya variabel Jumlah Penduduk (X₁) yang memenuhi kriteria.

3.2.8 Collinearity Diagnostics

Output *Collinearity Diagnostics* mengidentifikasi potensi multikolinieritas dalam regresi melalui Eigenvalue, Condition Index, dan Variance Proportions.

Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	JMLPENDUDUKX1
1	1	2.000	1.000	.00	.00
	2	.000	68.920	1.00	1.00

a. Dependent Variable: PAJAKDAERAH1

Gambar 8. Output Collinearity Diagnostics (Hasil Olah Data, 2024)

Eigenvalue menilai variasi tiap dimensi, di mana nilai tinggi (2.000) menunjukkan variasi besar dan nilai rendah (0.000) menunjukkan varians kecil. Condition Index mendeteksi multikolinieritas, nilai 68.920 pada dimensi kedua mengindikasikan masalah multikolinieritas. Variance Proportions menunjukkan proporsi varians, di mana nilai 1.00 pada dimensi kedua di konstanta dan variabel Jumlah Penduduk (X₁) menunjukkan keduanya terpengaruh oleh multikolinieritas.

3.3 Keterkaitan Analisis terhadap Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, kajian pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Daerah terhadap penerimaan pajak daerah memiliki peranan penting dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial suatu wilayah. Di Kabupaten Bangka, analisis ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Pajak daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan memelihara jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ketersediaan biaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk dapat menggunakan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dengan diketahuinya faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk, maka pemerintah daerah dapat mengupayakan dan mengambil keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan faktor yang berpotensi meningkatkan pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, jumlah penduduk menjadi faktor yang berpotensi dapat memberikan kontribusi dan

peranan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka. Meningkatnya penduduk di Kabupaten Bangka akan membuat aktivitas ekonomi meningkat pula.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk yang merupakan variabel bebas atau X_1 memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sebesar 77% yang menggambarkan bahwa variasi penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk. Variabel Jumlah Penduduk (X_1) memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seiring dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Bangka. Dengan hasil yang telah ada ini, maka dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang telah diuji, jumlah penduduk menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka.

5. REFERENSI

- Adisamita, R. (2010). *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Eriyanto, Y. D. (2006). *Pengelolaan Sumber Air bersih secara Partisipatif di Gunung Merbabu*. Semarang: Tugas Akhir tidak diterbitkan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Diambil kembali dari djpk.kemenkeu.go.id: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Lawrence, R. J. (2003). Human ecology and its applications. *Science Direct*, 31-40.
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*, 3(3), 906-915.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308-316.
- Setiani, E. A., Domai, T., & Wachid, A. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Adminisitrasi Publik (JAP)*, 2(3).
- Sudariana, N., & Yoedani. (2021). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda.
- Suharjo, G., R.M, N. B., & Nadiasa, M. (2014). ANALISIS FAKTOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH PERDESAAN DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Spektran*, 28-35.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Wulandari, E., Faturrohman, H., & Widodo, S. T. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas II SDIT Insan Mulia Semarang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(5), 1415-1424.